

PENELITIAN MANDIRI

ANALISIS
SIM KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Oleh :
Dra. Ara Ruhara, M.Si.
Kurnia A. Dewi

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG 2005

PENELITIAN MANDIRI

ANALISIS SIM KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Oleh :
Dra. Ara Ruhara, M.Si.
Kurnia A. Dewi

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG 2005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, satu kata yang tepat untuk diucapkan sebagai wujud syukur kami atas selesainya laporan penelitian ini.

Tak ada gading yang tak retak, merupakan pepatah yang paling tepat bagi laporan penelitian yang kami sampaikan ini. Hal ini disebabkan banyak sekali kekurangan yang terdapat dalam laporan ini, dan kami sadar bahwa laporan ini masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu kami mohon masukan dan saran untuk menjadi lebih baik lagi.

Terima kasih, kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan kegiatan penelitian ini. Semoga menjadi pengalaman berharga dalam melakukan kegiatan selanjutnya. Dan semoga hasil penelitian yang kami sampaikan, dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi semua pihak terkait, terutama bagi Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan pengembangan SIM Kepegawaian menjadi seperti yang diharapkan.

Bandung, 1 Desember 2005

Tim penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I : Pendahuluan	 1
I. Latar Belakang	1
II. Ruang Lingkup	3
III. Tujuan dan Sasaran	4
IV. Manfaat Penelitian	4
V. Kerangka Pemikiran	5
VI. Metode Penelitian	6
VII. Tahapan Penelitian	6
VIII. Sistematika Penulisan	7
 BAB II : Kerangka Teoritis	 8
I. Konsep Dasar SIM	8
I. 1. Sistem	8
I. 2. Informasi	9
I. 3. Sistem Informasi	12
II. SIM Kepegawaian	17
 BAB III : Analisis SIM Kepegawaian	 21
I. SIMPEG Pemerintah Kota Bandung	21
II. Analisis SIMPEG Pemerintah Kota Bandung	28
II. 1. Identifikasi Masalah	28
II. 2. Memahami kerja dari system yang ada	30
II. 3. Analisis Sistem	31
 BAB IV : Penutup	 33
I. Kesimpulan	33
II. Saran	34
 Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Era globalisasi dewasa ini menempatkan manusia berada pada era tanpa batas “borderless”, tidak dibatasi oleh ruang dan teritorial. Fenomena tersebut ditandai dengan arus informasi dan komunikasi, ekonomi, perdagangan dan demokratisasi yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan cukup mendasar di segala bidang kehidupan. Begitu juga hal informasi dan komunikasi mengalir begitu cepat, bergerak dari satu unit ke unit lain, dari satu organisasi ke organisasi lain, tanpa mengenal teritorial tertentu.

Sejalan dengan laju pembangunan nasional dewasa ini dan laju peningkatan kemajuan teknologi di bidang informasi, komunikasi dan transportasi, memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi baru yaitu timbulnya pergeseran dalam tuntutan masyarakat akan tersedianya pelayanan yang lebih baik dari aparat pemerintah. Adanya dinamika masyarakat seperti terlihat sekarang ini, harus diantisipasi oleh aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan terutama dalam menghadapi era globalisasi ini.

Informasi yang merupakan salah satu kunci keberhasilan dari Sistem Informasi yang handal sehingga menjadi kebutuhan mutlak dalam penyelenggaraan kehidupan di segala bidang, baik dalam hal perekonomian maupun strategi penyelenggaraan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Sistem Informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, serta mempunyai peranan yang besar dalam kegiatan di atas.

Pengelolaan informasi dalam pemerintahan, dirasakan masih tertinggal dari sektor-sektor lain, bahkan menjadi salah satu kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintahan sebagai suatu organisasi yang tidak bisa terlepas dari kondisi lingkungan yang terus berubah, menyadari akan

pentingnya informasi, menyadari bahwa pengelolaannya membutuhkan penanganan dan perhatian yang serius. Untuk mewujudkan hal tersebut, bisa dimulai dari dalam organisasi sendiri, misalnya dengan tidak mengabaikan setiap data yang ada dan mengelolanya dengan lebih baik, walaupun masih dilakukan secara manual ataupun menggunakan alat bantu seperti komputer sebatas pada pengolahan data saja.

Pemerintah sendiri dengan segala upaya berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, dengan tujuan untuk lebih meyakinkan bahwa pelayanan diberikan dengan waktu dan lokasi yang paling menyenangkan bagi yang memerlukannya. Untuk itu, sumber daya manusia yang menjadi pelaku dalam pemberian pelayanan harus ditunjang oleh berbagai data dan informasi yang terorganisir dengan lebih baik.

Salah satu upaya untuk mengolah dan mengelola data dengan baik, dilakukan dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Keberadaan SIM di suatu organisasi seperti instansi pemerintah, akan mempermudah dalam proses pengolahan data dan pencarian informasi secara cepat dan akurat. Untuk pelaksanaan dari SIM tersebut, diperlukan antara lain :

1. Sumber Daya Manusia yang kompeten
2. Sarana dan prasarana yang memadai
3. Sistem yang jelas, efektif dan efisien

Penerapan SIM dapat dilakukan pada berbagai substansi dan keperluan, mulai dari yang sifatnya sederhana sampai yang kompleks. Mulai dari SIM yang hanya menangani satu bidang kegiatan saja sampai dengan SIM yang lebih kompleks, yang menangani berbagai bidang kegiatan sekaligus. Sebagai contoh, SIM yang saat ini sudah diterapkan di instansi pemerintah antara lain :

- Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU)
- Sistem Informasi Manajemen Geografi (SIMGEO)
- Sistem Informasi Manajemen Kepariwisata (SIMPAPAR)
- Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

SIMGEO dan SIMPAR merupakan SIM yang digunakan oleh instansi tertentu dengan jumlah pemakai yang terbatas pula, karena hanya memuat data yang berkaitan dengan substansi masing-masing.

SIMKEU dan SIMPEG merupakan SIM yang mudah ditemukan di setiap instansi atau organisasi manapun, karena keduanya menangani kegiatan yang pasti ada di setiap instansi atau organisasi. SIMKEU dirancang untuk perencanaan pengelolaan dan Pengendalian Sistem Administrasi Keuangan.

Sedangkan SIMPEG yang menjadi fokus penelitian, dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang ada hubungannya dengan data dan informasi pegawai, di mana data dan informasi mengenai pegawai yang harus diperhatikan, dimulai saat pegawai tersebut diterima, jenjang karir, pendidikan, mutasi, prestasi, sampai saatnya pegawai tersebut pensiun. Hal ini yang menjadikan alasan mengapa SIMPEG diperlukan. Karena banyak sekali aspek yang tercakup dalam hal kepegawaian yang harus diperhatikan. Karena informasi yang menjadi hasil pengolahan data yang dilakukan SIMPEG, sangat diperlukan oleh semua pegawai di semua tingkatan manajemen, tidak hanya pegawai yang terlibat langsung di bagian kepegawaian yang bertugas untuk mengolah semua data kepegawaian, tetapi juga pegawai lainnya yang senantiasa memerlukan berbagai informasi yang berkaitan dengan dirinya, hingga ke pegawai yang menduduki jabatan pimpinan, sebagai bahan untuk proses pengambilan keputusan.

Untuk bisa mewujudkan SIMPEG yang bisa menyediakan lebih banyak informasi kepada pemakai yang membutuhkannya, perlu dilakukan analisis, salah satunya terhadap SIMPEG yang sudah ada untuk mengetahui kelemahannya sehingga bisa dirumuskan pengembangannya.

Hal inilah yang mendorong dilakukannya penelitian ini, sebagai upaya untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan SIMPEG di Pemerintah Kota Bandung, untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan SIMPEG beserta berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi sehingga akan diperoleh solusi untuk mengatasinya, jika pengembangan terhadap SIMPEG tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan.

II. Ruang Lingkup

Fokus penelitian adalah melakukan analisis terhadap SIMPEG yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, untuk kemudian diberikan saran

pengembangannya, sehingga diharapkan bisa memenuhi lebih banyak kebutuhan pemakainya dan mengatasi keluhan-keluhan yang muncul selama ini. Adapun hal yang dikaji, lebih difokuskan kepada prosedur sistem yang dipergunakan.

III. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah memberikan masukan mengenai konsep Sistem Informasi Kepegawaian yang lebih baik di Pemerintah Kota Bandung, yang ditekankan kepada prosedur sistem yang digunakan, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pemakai dengan memberikan data dan informasi dengan lebih cepat, akurat dan relevan.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka kegiatan penelitian ini diharapkan dapat mencapai sasaran sebagai berikut :

- (1) Mendapatkan informasi yang jelas mengenai implementasi Sistem Informasi Kepegawaian di Pemerintah Kota Bandung;
- (2) Mendapatkan cara yang tepat dalam mengolah berbagai data sehingga bisa diperoleh informasi dengan cepat, mudah dan keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan;
- (3) Mendapatkan informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasi Sistem Informasi ini.

IV. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian yang ada, menjadi lebih dapat diandalkan dalam mendukung terciptanya manajemen pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien, mengingat jumlah pegawai yang menjadi objek dari pengolahan data SIMPEG ini cukup banyak, meliputi semua pegawai yang ada di semua Unit Kerja di bawah Pemerintah Kota Bandung. Untuk itu dibutuhkan suatu proses pengolahan data yang bisa memberikan lebih banyak informasi kepada pemakai.

V. Kerangka Pemikiran

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang professional, bertanggung jawab, jujur dan adil, yang salah satunya akan didapat melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan system prestasi kerja dan system karir, dengan dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Untuk itu dilakukan proses pengembangan pegawai yang pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kemampuan. Informasi akurat mengenai prestasi kerja seorang pegawai sangat mungkin didapatkan jika data mengenai prestasi kerja pegawai yang bersangkutan dikelola dengan baik.

Kenyataannya, pengolahan data kepegawaian dan penyediaan informasi mengenai seorang pegawai saat ini, masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya keluhan dari pegawai dalam hal pemrosesan dan tidak mudahnya mendapatkan data mengenai dirinya. Proses dan birokrasi yang harus ditempuh dalam upaya melengkapi data pendukung, membuat seorang pegawai merasa enggan untuk berurusan dengan bagian Kepegawaian, untuk mengurus hal apapun yang berkaitan dengan Bagian Kepegawaian. Sistem Informasi Kepegawaian yang saat ini sudah diterapkan pun, belum berpengaruh banyak terhadap proses atau kegiatan yang berjalan di Bagian Kepegawaian, contohnya saja proses pengurusan Kenaikan Pangkat, yang selalu saja terlambat. Tidak tersedianya (di unit kerja masing-masing) berbagai formulir yang harus diisi oleh pegawai, membuat para pegawai menunda untuk melengkapi data pendukung, yang seharusnya segera untuk disediakan. Apalagi bagi pegawai yang mempunyai cukup banyak tugas yang harus diselesaikan.

Di samping itu diperlukan juga sistem yang bisa menentukan pegawai-pegawai yang berprestasi sehingga keberadaan dan kemampuannya bisa tetap dipertahankan di suatu organisasi atau unit kerja, dan juga meningkatkan kemampuan pegawai dengan menentukan pendidikan (formal ataupun non formal) yang dibutuhkan.

Tidak mudah bagi seorang pimpinan dalam membuat keputusan, memilih seorang yang tepat untuk duduk pada suatu posisi tertentu di organisasi, apalagi untuk menangani posisi yang sangat strategis bagi organisasi. Di mana untuk melakukan hal

ini, diperlukan suatu rekaman analisa informasi dari data yang dimiliki oleh seorang pegawai, sejak yang bersangkutan masuk ke dalam organisasi. Atau bagaimana pimpinan bisa merencanakan pendidikan serta memberikan kesempatan/tantangan kepada seorang pegawai bila yang bersangkutan ingin diproyeksikan pada jabatan tertentu.

Berdasarkan pertimbangan di atas diperlukan suatu Sistem Informasi Kepegawaian yang dapat memenuhi kebutuhan proses/analisa dan informasi tersebut di atas. Sistem ini harus bisa menunjang sistem-sistem lainnya yang ada pada organisasi tersebut, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembangunan dan pengembangan SIMDA yang harus didukung oleh data dan semua sistem yang ada pada daerah bersangkutan, menjadikan keberadaan SIMPEG yang handal tidak bisa diabaikan lagi.

VI. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang berusaha mendapatkan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya, berupa data, fakta dan informasi sebagai landasan empiris yang kemudian akan dipadukan dengan landasan teoritis dan konsepsi untuk menghasilkan rumusan SIMPEG yang efektif dan efisien.

VII. Tahapan Penelitian

Secara garis besar, kegiatan penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan, terdiri dari penyusunan rancangan penelitian.
2. Pengumpulan data, yaitu proses pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :
 - Pengamatan/observasi

Mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian, sehingga dari hasil penelitian dapat dilakukan evaluasi dari berbagai macam permasalahan yang muncul.

- Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data atau masukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pegawai yang menjadi bagian dari SIMPEG Pemerintah Kota Bandung (pengelola maupun pemakai).

- Telaah Kepustakaan

Merupakan studi kepustakaan dengan mengadakan pencatatan, pengumpulan data sekunder sebagai landasan teoritis, yang dapat menunjang dalam penulisan laporan penelitian ini.

3. Pengolahan data, hasil dari survei data dan wawancara yang terkumpul diolah dan dianalisis untuk perumusan SIMPEG yang lebih baik
4. Analisis data dan perumusan pengembangannya
5. Penulisan laporan akhir

VIII. Sistematika Penulisan

Laporan hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran penelitian, metode penelitian, tahapan penelitian dan sistematika penulisan laporan.
2. Bab II berisi tentang teori dan kebijakan berkenaan dengan Sistem Informasi Manajemen dan aplikasi SIMPEG.
3. Bab III berisi tentang gambaran umum pelaksanaan SIMPEG di Pemerintahan Kota Bandung dan proses analisis terhadap implementasi SIMPEG.
4. bab IV berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi, yaitu kristalisasi dari uraian bab-bab sebelumnya serta usulan-usulan bagi pengembangan SIMPEG sehingga sesuai dengan yang diharapkan.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

Konsep Dasar SIM

Definisi SIM atau Sistem Informasi Manajemen, bisa ditelusuri dari setiap pengertian kata pendukung SIM itu sendiri, yaitu Sistem, Informasi dan Sistem Informasi. Hal-hal tersebut bisa didefinisikan sebagai berikut :

I. 1. Sistem

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan dan sasaran, di mana pencapaian terhadap tujuan maupun sasaran yang ditentukan oleh sebuah sistem, menjadi indikator keberhasilan dari sistem tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah :

1. Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas,
2. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dsb.,
3. Metode.

Jogiyanto Hartono (1989 : 1) mengemukakan pendapatnya mengenai sistem, yaitu sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Karena suatu sistem bisa terdiri dari subsistem-subsistem, maka pendekatan sistem yang lebih menekankan kepada elemen atau komponennya, lebih banyak diterima. Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa :

Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu

Sebagaimana definisi di atas, maka suatu objek dinamakan sistem jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : merupakan kesatuan yang bagian-bagiannya saling berinteraksi dan mempunyai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, bagian-bagian sistem bukanlah merupakan unsur-unsur yang terpisah atau terbagi dan berdiri

sendiri, tetapi keterpisahan itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh serta sinergistik. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, maka sistem itu harus dikontrol oleh manusia dan bukan manusia yang dikendalikan oleh sistem.

I. 2. Informasi

Informasi dapat mengenai data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah komunikasi dan dapat memperkaya penyajian, mempunyai nilai kegiatan atau mengungkap suatu yang penerimaannya tidak tahu/tidak tersangka.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan bahwa " Informasi adalah penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu".

Memandang informasi sebagai hal yang sangat penting dalam rangka pengambilan keputusan, maka informasi tersebut harus akurat, tepat waktu dan relevan. Akurat berarti informasi tersebut bebas dari kesalahan-kesalahan dan mencerminkan maksud sehingga pemakai informasi mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud. Tepat waktu diartikan sebagai ketepatan waktu dalam penyampaian informasi, karena informasi yang terlambat akan berakibat fatal bagi organisasi. Sedangkan relevan menunjukkan bahwa informasi harus mempunyai manfaat bagi pemakainya.

Jogiyanto Hartono (1989 : 8), menuliskan bahwa informasi dapat didefinisikan sebagai pengolahan data yang telah mempunyai arti sehingga dapat digunakan khususnya oleh manajemen yang membuat keputusan.

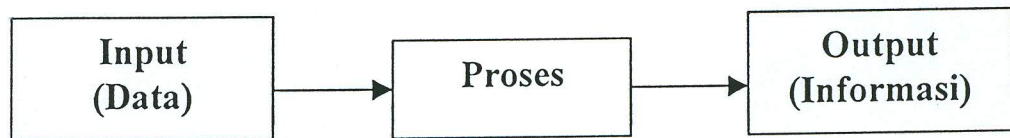
Dari definisi-definisi di atas, dapat dikatakan bahwa :

Informasi adalah data yang telah diproses dan mengandung arti bagi seseorang dalam proses pengambilan keputusan.

Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu.

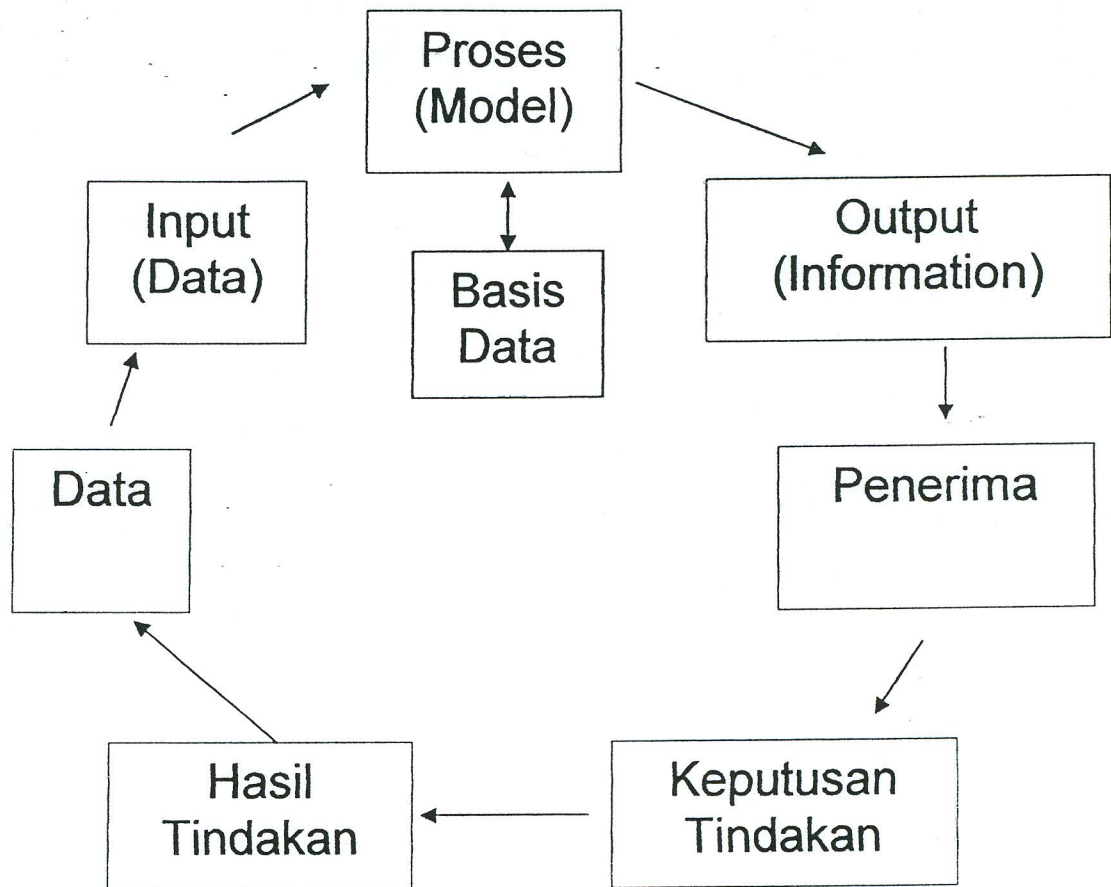
Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum bisa bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model untuk dihasilkan

informasi. Proses pengolahan data menjadi informasi, bisa digambarkan sebagai berikut :



- Proses Pengolahan Data menjadi Informasi -

Proses di atas hanyalah sebuah bentuk sederhana dari pengolahan data menjadi informasi. Jika proses yang terjadi dikembangkan, di mana data yang diolah menjadi informasi akan diterima oleh pemakainya, untuk kemudian dibuat suatu keputusan dan dilakukan suatu tindakan, yang berarti akan menghasilkan suatu tindakan lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data ini akan ditangkap sebagai input, diproses kembali dalam suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Siklus ini dinamakan *siklus pengolahan data* atau *siklus informasi*, dan bisa digambarkan sebagai berikut :



- Siklus Informasi -

Pada gambar di atas, input data biasanya merupakan proses update data terhadap data yang ada pada Basis Data yang sudah tersimpan terlebih dahulu di dalam SIM. Misalnya, pada SIMPEG terjadi perubahan atau kenaikan pangkat dari seorang pegawai, maka kepangkatan yang baru akan menjadi input bagi SIMPEG untuk kemudian diproses untuk kemudian dihasilkan informasi seorang pegawai dengan kepangkatan yang baru, untuk semua jenis laporan yang dikeluarkan SIMPEG, misalnya DUK. Dari DUK yang dikeluarkan bisa diambil keputusan mengenai penempatan seorang pegawai pada suatu jabatan tertentu. Hasil tindakan sebagai akibat dari keputusan yang diambil pimpinan akan menjadi data baru dan menjadi input baru bagi SIMPEG yang bersangkutan. Demikian terjadi secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu siklus informasi.

I. 3. Sistem Informasi

Informasi yang sangat penting bagi manajemen, didapatkan dari suatu sistem informasi.

Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan untuk mengendalikan jalannya organisasi.

Sistem Informasi dibuat untuk mencapai beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk memproses atau mengubah data menjadi informasi secara lebih ekonomis. Sistem informasi yang dimaksud di atas adalah suatu sistem yang berbasis komputer (CBIS – *Computer Based Information System*-), yang melakukan pengolahan terhadap data -yang semula tidak mempunyai arti- menjadi informasi yang benar-benar bermanfaat, yang mendukung dan bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan.

Informasi yang merupakan salah satu kunci keberhasilan dari Sistem Informasi yang handal telah menjadi kebutuhan mutlak dalam penyelenggaraan kehidupan di segala bidang, serta untuk mendukung upaya pembangunan. Saat ini, Sistem Informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, serta mempunyai peran yang besar dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan Sistem Informasi dapat mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera.

Pengembangannya sendiri dalam berbagai sektor telah diamanatkan sejak GBHN 1993, yang sejalan dengan upaya untuk terus meningkatkan terciptanya jaringan informasi yang andal, efisien serta mampu mendukung industrialisasi dan upaya pemerataan pembangunan. Amanat GBHN tersebut telah dijabarkan ke dalam Repelita VI melalui bab khusus mengenai Sistem Informasi yang handal ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dan perhatian yang semakin besar dari Pemerintah dalam pengembangan

Sistem Informasi dalam era informasi yang semakin pesat perkembangannya dewasa ini. Dan hal ini tentu saja harus didukung oleh semua pihak.

Dari pengertian Sistem, Informasi dan Sistem Informasi di atas, bisa didefinisikan bahwa :

Sistem Informasi Manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen, baik untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan manajerial.

Berkembangnya organisasi akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi pada setiap level manajemen. Sehingga kebutuhan koordinasi dan komunikasi juga meningkat. Ketika sistem informasi telah dibuat, kebiasaan pelaporan formal, setengah formal maupun informal dapat distandarisasikan. Arus informasi pun akan diatur berdasarkan tingkatan pemakainya. Kriteria bagi Sistem Informasi Manajemen yang tepat adalah sistem tersebut harus dapat memberikan data yang cermat, tepat waktu dan penting artinya bagi perencanaan, analisis dan pengendalian manajemen untuk mengoptimalkan pertumbuhan organisasi.

Keberadaan SIM di berbagai instansi pemerintah, selain didasari oleh adanya keinginan untuk mengolah dan mengelola data dengan lebih baik, juga didasari oleh Kepmendagri No. 445 tahun 1992 tentang pembangunan SIMDAGRI dan SIMDA yang penerapan dan pengembangannya di daerah telah diinstruksikan kepada Kantor Pengolah Data Elektronik (KPDE) di Daerah Tingkat I maupun Tingkat II. KPDE sendiri merupakan lembaga yang diberi wewenang/instruksi untuk menerapkan dan mengembangkan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) di daerahnya masing-masing, dengan data yang diolah/dikelola merupakan data-data yang terkait dengan SIMDA yang relatif bersifat administratif, seperti data kepegawaian, data keuangan dan data perlengkapan. Hal ini merupakan upaya untuk memadukan berbagai data dan informasi yang beragam dan tersebar ke dalam suatu basis data pembangunan daerah yang terpadu, yang sangat dibutuhkan dalam rangka menyusun suatu masukan bagi penentu kebijakan di tingkat daerah.

Agar informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi dapat mengena dan bermanfaat untuk manajemen, maka seorang analis sistem harus mengetahui

kebutuhan-kebutuhan informasi yang diinginkan manajemen. Jika sistem yang ada sudah tidak bisa menyediakan apa yang diinginkan, maka sudah waktunya dilakukan pengembangan terhadap sistem tersebut.

Pengembangan Sistem Informasi merupakan tugas kompleks yang membutuhkan banyak sumber daya dan dapat memakan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Proses pengembangan sistem melewati beberapa tahapan, mulai dari sistem direncanakan, diterapkan, dioperasikan dan dipelihara. Jika operasi sistem sudah diterapkan, tetapi masih banyak masalah yang muncul, maka perlu dikembangkan suatu sistem baru untuk mengatasinya, dan proses ini kembali ke tahap awal. Keadaan ini dinamakan Siklus Hidup suatu System (*Systems Life Cycle*).

Umumnya, Siklus Hidup suatu System terdiri dari :

- Tahap Perencanaan Sistem
- Tahap Analisis Sistem
- Tahap Desain Sistem
- Tahap Implementasi Sistem

Analisis Sistem (*System Analysis*) merupakan salah satu tahap dalam Siklus Hidup Suatu System, yang dilakukan setelah tahap perencanaan sistem (*system planning*) dan sebelum tahap desain sistem (*system design*). Bukan berarti hal ini dilakukan pada sistem yang belum diterapkan, tetapi juga terhadap sistem yang sudah ada. Tahap ini merupakan salah satu tahapan penting untuk mengetahui seberapa jauh sistem tersebut telah mencapai sasarannya. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara rutin, untuk menganalisis sistem, untuk menemukan kelemahan-kelemahannya sehingga bisa diusulkan perbaikannya.

Menurut Drs. Jogiyanto H., MBA. Dalam bukunya *Analisis dan Disain Sistem*, Analisis Sistem bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Dalam tahap ini terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan, yang terdiri dari :

- *Identify*, yaitu mengidentifikasi masalah

- *Understand*, memahami kerja dari sistem yang ada
- *Analyze*, yaitu menganalisa sistem
- *Report*, yaitu membuat laporan hasil analisa

Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka akan diperoleh gambaran mengenai apa yang harus dilakukan seorang analis sistem. Dan ini waktunya untuk memikirkan sistem apa yang akan dibentuk. Tahap ini disebut dengan tahap Desain sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, maka suatu sistem atau proses desain sistem harus mencapai sasaran sebagai berikut :

- Desain sistem harus berguna, mudah dipahami dan nantinya mudah untuk digunakan.
- Desain sistem harus bisa mendukung tujuan dari organisasi
- Desain sistem harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan transaksi, pembuatan laporan dan mendukung keputusan yang akan dilakukan manajemen.
- Desain sistem harus dapat mempersiapkan rancang bangun yang terinci untuk masing-masing komponen dari sistem informasi yang meliputi data dan informasi, simpanan data, metode-metode, prosedur-prosedur, orang-orang, hardware, software, dan pengendalian intern.

Untuk bisa memenuhi tujuan di atas yaitu memenuhi kebutuhan pemakai sistem, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut yang merupakan kebutuhan sistem secara umum, yaitu :

1. Keandalan

Menunjukkan sejauh mana sistem bisa diandalkan dalam melakukan proses yang dapat dipercaya dan dibutuhkan.

2. Ketersediaan

Menunjukkan bahwa sistem harus mudah diakses oleh pemakai.

3. Keluwesan

Menunjukkan sistem mudah beradaptasi dengan memuaskan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pemakai yang berubah.

4. Skedul instalasi

Menunjukkan periode waktu antara saat organisasi sadar akan kebutuhan sistem atau pengembangan sistem dengan waktu sistem baru diterapkan, sehingga bisa dibuat sistem yang terbaik dalam batas waktu yang dibutuhkan.

5. Masa pemakaian dan potensi perkembangannya

Menunjukkan bahwa sistem harus bisa diprediksi bisa memenuhi kehendak pemakai untuk jangka waktu tertentu, dan prospek untuk perkembangannya pun lebih mudah. Dalam arti tidak harus merubah total sistem yang sudah ada.

6. Kemudahan dalam pemeliharannya

Menunjukkan bahwa sistem harus dirancang agar memberi kemudahan

Selain hal di atas, bagi sistem yang lebih menekankan pada kegiatan operasional, harus diperhatikan juga kebutuhan pengolahan datanya sendiri, yang meliputi :

1. Volume data yang terlibat dalam pengolahan data, yang menunjukkan berapa banya jumlah data yang harus diproses dalam satu periode tertentu.
2. Hambatan waktu pengolahan, yang menunjukkan waktu yang diperlukan saat data diproses sampai informasi dihasilkan.
3. Permintaan perhitungan, merupakan model-model matematik yang harus diterapkan sehingga informasi dapat dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan pemakai.

Selain hal-hal diatas, yang harus diperhatikan juga adalah faktor manusianya. Sistem yang dikembangkan harus dapat diterima oleh semua pemakainya, tidak hanya satu atau dua pemakai saja. Untuk itu sistem harus bisa bersahabat dengan pemakainya, tidak sebaliknya menyulitkan pemakai. Sistem Informasi yang dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor manusianya, merupakan sistem informasi dengan user interface yang baik dan dapat meningkatkan produktivitas pemakainya. Selain itu agar sistem yang baru lebih baik, Sumber Daya Manusia yang mengelolanya harus bisa ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya.

II. SIM Kepegawaian (SIMPEG)

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, SIM Kepegawaian adalah suatu sistem informasi yang mengolah dan mengelola data pegawai menjadi informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen, baik untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan manajerial. SIMPEG dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang ada hubungannya dengan data dan informasi pegawai, di mana data dan informasi mengenai pegawai yang harus diperhatikan, dimulai saat pegawai tersebut diterima, perkembangan/jenjang karir, pendidikan, mutasi, prestasi, sampai saatnya pegawai tersebut pensiun.

SIMPEG hendaknya mencakup semua aspek informasi kepegawaian yang ada di Indonesia, dari mulai acuan standar yang digunakan sampai dengan sistem pelaporan yang dihasilkan. Hal ini ditunjang pula oleh beberapa metode implementasi tertentu yang bertujuan untuk mempermudah penggunaan dan juga perluasan ruang lingkup di masa mendatang.

Umumnya, pada sebuah Sistem Kepegawaian terdapat suatu bentuk model data yang pada dasarnya mencakup proses-proses yang berhubungan dengan hal sebagai berikut :

1. Perencanaan Pegawai

Proses ini merupakan proses analisa dan simulasi kebutuhan pegawai sesuai dengan data rekapitulasi kekuatan SDM yang dimiliki oleh organisasi, dikaitkan dengan rencana pengembangan aktifitas organisasi di masa mendatang. Hal ini akan berdampak kepada pengadaan ataupun penempatan pegawai pada suatu lokasi/unit yang membutuhkan.

2. Administrasi Personalia

Merupakan proses yang paling mendasar dalam pengumpulan informasi yang berhubungan dengan sistem kepegawaian. Informasi yang dikumpulkan berhubungan dengan kelengkapan atau pelengkap dari proses administrasi umum yang berhubungan dengan seorang pegawai. Adapun proses yang terjadi di dalamnya merupakan proses perekaman data umum kepegawaian seperti :

- Biodata pegawai

- Sejarah kepangkatan
- Sejarah jabatan
- Sejarah pendidikan formal
- Sejarah Pendidikan Penjenjangan
- Sejarah Pendidikan Substansial
- Keahlian Berbahasa Asing
- Sejarah kunjungan ke luar negeri
- Daftar Keluarga
- Sejarah Hukuman dan Penghargaan yang sudah diperoleh
- Memo khusus

3. Kompensasi dan Benefit

Proses yang termasuk dalam kompensasi dan benefit adalah sebagai berikut :

- Proses penentuan gaji dan transaksinya
- Proses pemberian fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan di luar ruang lingkup kerja dan bertujuan untuk memberikan rasa aman selama bekerja, seperti fasilitas kesehatan dan pensiun.

4. Kinerja Pegawai

Dalam menilai kinerja seorang pegawai, dilakukan pengkajian dan umpan balik. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria dasar yang telah ditentukan oleh pihak manajemen, dan juga berdasarkan hasil kajian yang umumnya dilakukan oleh sebuah tim. Proses yang terjadi mencakup beban penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukannya.

5. Pendidikan dan Latihan

- Perencanaan jadwal pendidikan, yang berhubungan dengan jadwal pendidikan yang akan diselenggarakan oleh organisasi.
- Perencanaan kebutuhan pendidikan, berhubungan dengan rencana pendidikan yang akan diikuti seorang pegawai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

- Realisasi pendidikan, bertujuan mencatat informasi yang berhubungan dengan kesertaan seorang pegawai pada pendidikan yang diikutinya.

6. Pemutusan Hubungan Kerja/Pensiun

Proses ini bertujuan untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan selesainya masa kerja seorang pegawai. Sehingga informasi yang tersimpan dalam SIMPEG akan menjadi dasar bagi organisasi dalam menentukan hak-hak dan kewajiban yang harus dikeluarkan, seperti uang pensiun, pesangon dan lain-lain.

Semua aspek di atas harus menjadi acuan dalam pembentukan suatu SIMPEG.

Adapun lingkup informasi yang menjadi acuan dari Sistem Informasi ini adalah :

- Biodata, yang akan berisi data umum seorang pegawai seperti nama, tanggal lahir, alamat, agama, dll.
- Pangkat, yang mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan sejarah kepangkatan seorang pegawai.
- Jabatan, yang mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan sejarah jabatan seorang pegawai baik fungsional maupun struktural.
- Pendidikan, yang mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan sejarah pendidikan seorang pegawai dari SD sampai pendidikan formal terakhir, dan juga sejarah pendidikan penjenjangan dan substansial yang diikuti oleh pegawai tersebut.
- Benefit dan kompensasi, yang mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan sejarah perubahan gaji/penghasilan yang berhubungan dengan Kenaikan Pangkat atau berkala.
- Kemampuan Bahasa, yang mencatat kemampuan berbahasa asing dari seorang pegawai beserta tingkatannya.
- Prestasi Kerja, yang mencatat seluruh informasi yang berhubungan dengan sejarah penilaian atas prestasi kerja seorang pegawai.
- Penghargaan, yang mencatat seluruh penghargaan resmi yang diakui oleh organisasi.

- Kesra, yang mencatat seluruh fasilitas yang diterima oleh seorang pegawai untuk menunjang kelancaran operasi.
- Absensi, mencatat seluruh aktifitas ketidakhadiran seorang pegawai sehubungan dengan kebutuhannya.
- Daftar Keluarga, mencatat seluruh data anggota keluarga seorang pegawai.
- Hukuman Disiplin, yang mencatat seluruh hukuman yang pernah diterima seorang pegawai.
- Memo khusus, berisi catatan yang bersifat referensial terhadap seorang pegawai, di mana informasi ini bersifat informatif dan bukan administratif.

Ruang lingkup di atas adalah ruang lingkup informasi yang biasanya ada pada sebuah SIMPEG. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan ke ruang lingkup informasi lainnya, bila diperlukan.

BAB III
ANALISIS
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. SIMPEG Pemerintah Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan Sistem Informasi di Bagian Kepegawaian sejak tahun 2003, saat Otonomi Daerah mulai berjalan, sebagai upaya untuk mengolah dan mengelola data pegawai di semua unit kerja wilayah Pemerintah Kota Bandung dengan lebih baik. Lebih jauh dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada para pegawai yang membutuhkan informasi. Pegawai yang menjadi pemakai SIMPEG ini tersebar ke berbagai unit kerja yang berada di wilayah Pemerintah Kota Bandung, yang merupakan perangkat daerah yaitu organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah Kota Bandung
2. Dinas Daerah (20)
3. Lembaga Teknis Daerah (13)
4. Kecamatan (25)
5. Kelurahan (139)

Dengan jumlah pegawai yang berada di setiap perangkat daerah tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

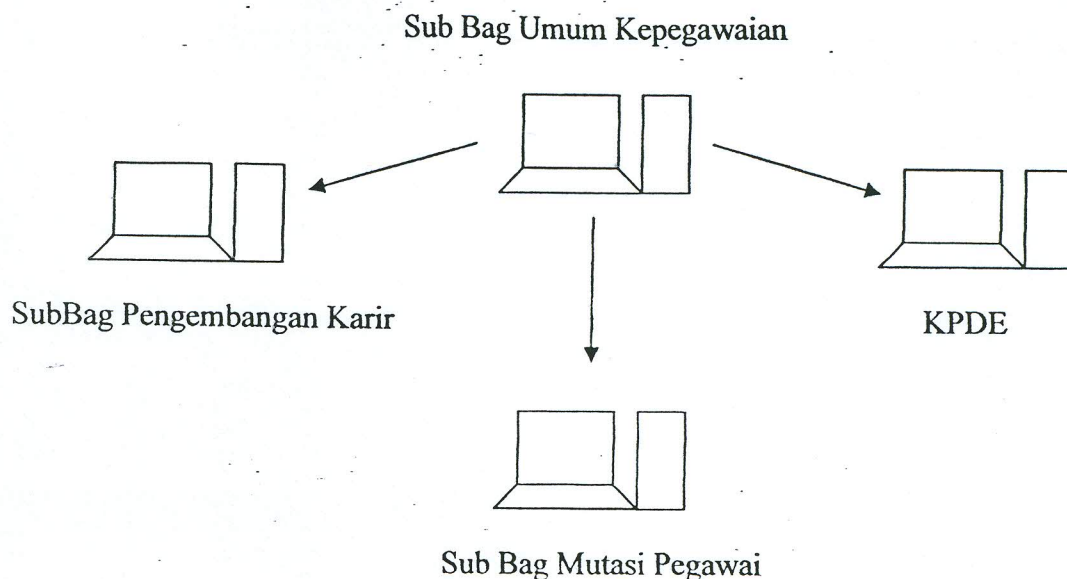
No.	Organisasi/Lembaga Pemerintah Kota Bandung	Jumlah Pegawai (orang)
1.	Sekretariat Daerah Kota Bandung	590
2.	Dinas Daerah	19.457
3.	Lembaga Teknis Daerah	1.480
4.	Kecamatan dan Kelurahan	1.355
Jumlah		22.816

SIMPEG ini dikelola oleh Sub Bagian Kepegawaian, yang merupakan sub bagian di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandung. Setda yang merupakan unsur staf Pemerintah Kota Bandung, mempunyai tupoksi membantu walikota dalam melaksanakan administrasi tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Penerapan SIMPEG ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh pegawai.

Bagian Kepegawaian Pemerintah Kota Bandung terdiri dari tiga Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Pengembangan Karir, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Kepegawaian di bidang administrasi pengembangan pegawai Daerah, seperti proses pengajuan dan pencatatan pegawai yang melaksanakan tugas belajar, ijin belajar, promosi pegawai, diklat dll.
2. Sub Bagian Umum Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Kepegawaian di bidang administrasi umum kepegawaian.
3. Sub Bagian Mutasi Pegawai, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Kepegawaian di bidang administrasi mutasi pegawai Daerah, seperti kepindahan – kedatangan seorang pegawai, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dll.

Sub Bag Umum yang menjadi Server dari pengolahan SIMPEG terhubung dengan Sub Bag Pengembangan Karir dan Sub Bag Mutasi Pegawai serta dengan KPDE Kotamadya Bandung. Hubungan ketiga sub bagian ini dengan adanya SIMPEG yang juga online dengan KPDE, bisa digambarkan sebagai berikut :



- SIMPEG yang terhubung dengan Unit Kerja lain -

Adanya sistem yang online seperti diatas menunjukan bahwa informasi yang dihasilkan SIMPEG, akan menjadi sangat bermanfaat di unit lainnya, baik Sub Bag Pengembangan Karir Pegawai, Sub Bag Mutasi Pegawai maupun KPDE. Informasi yang diterima oleh Sub Bagian Mutasi Pegawai sangat bermanfaat bagi proses pendataan pegawai yang pindah – datang, menentukan pegawai yang akan diproses KP maupun KGB-nya. Bagi Sub Bagian Pengembangan Pegawai informasi yang dihasilkan SIMPEG sangat bermanfaat bagi penentuan pegawai yang akan dipromosikan, yang akan diikutsertakan dalam suatu pendidikan (formal maupun non formal). KPDE sebagai lembaga yang mengelola SIMDA sangat dibantu dalam penyediaan data mengenai pegawai (PNS) yang berada di semua perangkat daerah Pemerintah Kota Bandung. Selain data dan informasi yang diterima sebagai pendukung dari SIMDA yang ditanganinya, juga sebagai bahan dalam perhitungan gaji semua pegawai (PNS) di wilayah Kota Bandung. Daftar gaji pegawai dikeluarkan oleh KPDE, dan masing-masing bendahara yang mengurus pengeluaran gaji dari semua dinas, lembaga, kantor dan kecamatan/kelurahan mengambilnya ke KPDE.

Ditinjau dari pengelolanya, sumber daya manusia yang menangani SIMPEG berjumlah tiga orang. Mereka terdiri dari dua orang yang bertugas sebagai Entry Data, dan satu orang sebagai programmer.

Kenyataan yang ada di lapangan, bahwa fungsi SIMPEG sebagian besar merupakan penyimpanan database kepegawaian, menjadikan keberadaannya sebagai pelayan bagi pegawai, seperti halnya Bagian Kepegawaian yang menjadi unit pelayanan terhadap unit lainnya. Keberadaannya sebatas menyediakan data untuk proses-proses yang berkaitan dengan pegawai, seperti KP, KGB, Daftar Riwayat Hidup Pegawai, hingga penyediaan format-format laporan seperti daftar pegawai, daftar nominasi KP, KGB dan pensiunan, DUK (Daftar Urut Kepangkatan), Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jenis kelamin, Gol./Ruang, Tingkat Pendidikan, Agama, Usia ataupun Unit Kerja.

Proses Entry Data pada saat awal penerapannya membuat sibuk para petugas yang mengerjakannya, karena begitu banyak data pendukung dari seorang pegawai yang harus dimasukkan. Untuk proses perekaman data tersebut, hal-hal yang harus dimasukkan terdiri dari :

1. Data Pribadi Pegawai, yang meliputi :

- Nama
- Identitas Kelamin
- Tempat/tanggal lahir
- Agama
- Status Perkawinan
- Alamat
- Kondisi Fisik
- Jenis Kepegawaian
- Nomor KARSU/KARSU
- Nomor TASPEN
- Nomor ASKES
- NPWP\Nomor Polis Asuransi
- Status Rumah

- Penguasaan Bahasa

2. Riwayat Pendidikan

3. Data Keluarga

Data Keluarga yang menjadi salah satu data pendukung SIMPEG, sudah dipastikan akan selalu akurat, karena selalu dilakukannya pengecekan jumlah anggota keluarga dari seorang pegawai secara berkala (setiap tahun).

4. Riwayat kepangkatan

5. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala

6. Riwayat Jabatan

7. Keikutsertaan dalam suatu kegiatan, seperti Diklat/Seminar/Kursus/Lokakarya/ Penataran, Kepartaian/Keormasan, dalam kunjungan ke luar negeri

8. Penilaian Pegawai

9. Tanda jasa/Penghargaan

10. Riwayat Cuti

Untuk selanjutnya, jika semua data pendukung dari setiap pegawai sudah masuk ke dalam database Kepegawaian, proses input data untuk seorang pegawai dilakukan jika ada penambahan, perbaikan ataupun penghapusan data yang sudah ada (proses update data). Misalnya, perubahan pada data keluarga karena adanya penambahan ataupun pengurangan anggota keluarga, ataupun penambahan data pangkat, jabatan, pendidikan pada riwayat kepangkatan, jabatan dan pendidikan. Dilakukan pengelompokan saat terjadi update data, yang meliputi data mengenai :

- Kepangkatan

Meliputi data : golongan, TMT, Masa Kerja, Gaji Pokok, Nomor SK dan Tanggal SK.

- Jabatan

Meliputi data : jabatan, masa jabatan (dari/sampai), nomor SK pengangkatan jabatan, tanggal SK dikeluarkan.

- Diklat

Meliputi data : Nama Diklat, lamanya diklat (dari/sampai), nomor ijazah/sertifikat, jumlah jam pelaksanaan diklat.

- Pendidikan
Meliputi data : Nama sekolah/Perguruan Tinggi, Tempat pelaksanaan pendidikan, tahun lulus, nomor ijazah.
- Keluarga
Meliputi data : Nama Anggota Keluarga, Tempat tanggal lahir, Jenis Kelamin, Hubungan Keluarga, Keterangan.
- Berkala
Meliputi data : SK KGB (pejabat, tanggal, nomor), pangkat, gol/ruang, gaji pokok, TMT, Masanya Mutasi Kenaikan Golongan (Bulan, Tahun), Waktu pengajuan/pengurusan KGB selanjutnya.
- Kartu Identitas
Mengenai nomor kartu yang dimiliki pegawai yang bersangkutan seperti kartu ASKES, KARIS/KARSU, TASPEN, NPWP, Nomor Polis Asuransi.
- Penghargaan
Pejabat yang mengeluarkan penghargaan, tanggal, nomor SK, Bentuk Penghargaan, dalam rangka, keterangan
- Kunjungan Luar Negeri
Meliputi data : Nama Negara yang dituju, tujuan, lamanya kunjungan, yang membiayai.
- Domisili
Meliputi data : alamat rumah, kampung, desa, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten, Propinsi, No. Telp, Kode pos, Status kepemilikan rumah (milik sendiri, kontrak/sewa, ikut orangtua/saudara/ rumah dinas, mess/asrama).
- Kondisi Fisik
Meliputi data : tinggi badan, berat badan, golongan darah, warna kulit, bentuk wajah, jenis rambut.
- Lain-lain
Meliputi data inti dari seorang pegawai yaitu NIP, Nama, Tempat tanggal lahir, Jenis Kelamin, Status Kawin, Agama dan Alamat.

- DP3

Meliputi data : tahun penilaian, nilai untuk masing-masing unsur penilaian (kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan), jumlah nilai, rata-rata, pejabat yang menilai.

Informasi sebagai hasil pengolahan dari SIMPEG, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manajerial dan operasional. Untuk kepentingan manajerial, maka informasi tersebut menjadi bahan pengambilan keputusan bagi para pengambil keputusan. Melalui DUK dan DP3 setiap pegawai yang merupakan salah satu output dari SIMPEG, akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menempatkan seorang pegawai dalam suatu jabatan tertentu ataupun memberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal ataupun non formal, untuk pengembangan karir dan pendidikannya.

Untuk kepentingan pribadi pegawai yang bersangkutan, bisa didapatkan Daftar Riwayat Hidup yang meliputi data pribadi seperti NIP, Nama, Tempat tanggal lahir, Jenis Kelamin, Status Kawin, Agama, Alamat, data riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, diklat, daftar keluarga dan data kunjungan ke luar negeri.

Untuk kepentingan operasional, berbagai laporan yang merupakan rekapitulasi pegawai sangat diperlukan. Laporan yang berupa rekapitulasi pegawai itu bisa dibuat dengan berdasarkan :

- Jenis Kelamin
- Usia
- Agama
- Tingkat Pendidikan
- Pangkat/golongan
- Jabatan Fungsional/Struktural
- Unit Kerja
- Masa pensiun

Sesederhana apapun laporan yang diinginkan jika melibatkan begitu banyak data, tetap saja tidak bisa diperoleh dalam waktu cepat, jika dilakukan secara

manual. Sehingga keberadaan SIMPEG di Pemerintah Kota Bandung sangat membantu banyak dalam melakukan pengolahan data kepegawaian untuk mendapatkan berbagai laporan yang diinginkan, walaupun belum mencapai hasil yang maksimal dan masih ada kebutuhan-kebutuhan akan informasi yang belum terpenuhi.

II. Analisis SIMPEG Pemerintah Kota Bandung

Seperti sudah disampaikan sebelumnya, diperlukan beberapa langkah tertentu untuk melakukan analisis terhadap suatu sistem. Demikian juga halnya terhadap SIMPEG Pemerintah Kota Bandung. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

II.1. Identifikasi Masalah

Hal pertama yang dilakukan adalah mengenali dan menentukan berbagai permasalahan yang terjadi di Bagian Kepegawaian, baik untuk proses yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan SIMPEG yang diterapkan. Permasalahan yang seringkali terjadi adalah :

1. Pegawai yang mengeluh karena terlambat dalam proses Kenaikan Pangkat (KP), yang jelas-jelas data/informasi mengenai KP merupakan kewenangan Bagian Kepegawaian.
2. Keterlambatan pemrosesan data pendukung dari seorang pegawai yang berasal dari pegawai itu sendiri, yang akan menghambat kepada proses lainnya seperti : data pendidikan, keikutsertaan dalam diklat, seminar dan sejenisnya.
3. *Complain* dari pegawai karena adanya ketidaksesuaian file individual dengan data yang ada dalam komputer

Dari masalah yang sudah bisa diidentifikasi, bisa ditemukan kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab terjadinya masalah diatas, yaitu :

1. Untuk masalah pertama, dapat diidentifikasi bahwa yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut adalah :

- Keterlambatan turunnya SK KP dari instansi yang berwenang mengeluarkannya.
 - Ketidaksiapan pegawai sendiri dalam melengkapi semua persyaratan KP sehingga akan memperlambat proses pengajuan/pengurusan dari KP.
2. Untuk masalah kedua, dapat diidentifikasi bahwa yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut adalah :
- Ketidaksiapan pegawai sendiri dalam melengkapi data pendukung mengenai data pendidikan/diklat/seminar dan sejenisnya yang terakhir diikuti.
 - Kelalaian petugas yang menerima data, sehingga data yang dikumpulkan oleh seorang pegawai bisa hilang.
3. Untuk masalah ketiga, dapat diidentifikasi bahwa yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut adalah :
- Petugas Entry Data yang tidak segera memasukan perkembangan data seorang pegawai, sehingga saat seorang pegawai ingin mengetahui perkembangan mengenai dirinya, dengan cara melihat arsip pegawai tersebut, yang memang selalu diarsipkan setiap ada perubahan, ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data yang ada di komputer.
 - Pegawai sendiri lupa menyerahkan data mutakhir dirinya dan merasa sudah memberikannya kepada petugas Entry Data.

Berdasarkan penyebab masalah di atas, bisa diketahui titik keputusan yang mengakibatkan terjadinya sebab masalah tersebut yaitu :

1. Penanganan data pegawai di Bagian Kepegawaian. Hal ini bisa mengakibatkan pelayanan kepada pegawai menjadi kurang baik.
2. Sosialisasi formulir pengajuan KP atau formulir penambahan data pendukung pegawai di Bagian Kepegawaian, yang juga mengakibatkan pelayanan kepada pegawai menjadi kurang baik.
3. kelengkapan data pendukung dari pegawai itu sendiri.

Dari titik-titik keputusan yang menjadi sebab masalah yang terjadi, dapat ditetapkan pihak mana saja yang bertanggung jawab atas terjadinya masalah di atas.

II. 2. Memahami kerja dari sistem yang ada

Prosedur yang berjalan pada SIMPEG, merupakan prosedur yang umum dilakukan jika suatu Sistem Informasi diterapkan yaitu ada proses pemasukan data yang akan diolah SIMPEG untuk kemudian diperoleh output berupa informasi yang sangat bermanfaat. Adakalanya sebagian dari informasi itu menjadi input juga bagi proses selanjutnya.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa data yang menjadi masukan biasanya merupakan data yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan dari pegawai yang bersangkutan. Data seorang pegawai tidak akan mungkin tertukar dengan data pegawai lainnya, karena setiap pegawai mempunyai satu identitas yang tidak sama dengan pegawai lainnya, yaitu Nomor Induk Pegawai (NIP). Data seorang pegawai akan bisa dimunculkan saat NIP yang akan menjadi key record dimasukan.

Prosedur kerja dari SIMPEG Pemerintah Kota Bandung sendiri bisa digambarkan sebagai berikut :

1. Proses Entry Data awal untuk semua pegawai yang berada di semua unit kerja di bawah Pemerintah Kota Bandung.
2. Setiap kali terjadi perubahan data dari seorang pegawai, harus segera diinformasikan kepada bagian Kepegawaian atau kepada pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini terdapat dua keadaan yaitu :
 - jika data tersebut merupakan kewenangan pegawai, maka pegawai yang bersangkutan harus menyerahkan berbagai data terakhir beserta data pendukungnya, misalnya data pendidikan terakhir yang telah ditempuh beserta fotocopy ijazah atau transkrip nilai yang sesuai dengan pendidikannya itu, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
 - Jika perubahan data merupakan kewenangan bagian Kepegawaian, maka petugas secara langsung memasukan data terbaru ke dalam SIMPEG.

Misalnya turunnya SK KP atau KGB terbaru dari seorang pegawai, maka datanya bisa langsung dimasukan

3. Jika seorang pegawai ingin mengetahui data dirinya sampai saat ini, bisa saja minta untuk diberikan print out-nya oleh petugas SIMPEG.
4. Pimpinan yang ingin mengetahui jumlah pegawai yang ada berdasarkan kriteria tertentu, bisa langsung dibuat print out-nya, atau ingin mengetahui pegawai yang akan pensiun pada saat ini sehingga bisa dilakukan penghitungan berapa pegawai baru yang akan diterima pada saat mendatang.
5. Laporan mengenai daftar gaji pegawai, rekap

Dari prosedur kerja di atas bisa dipastikan bahwa SIMPEG sudah cukup membantu banyak dalam penyediaan informasi bagi semua tingkatan manajemen yang terlibat di Pemerintahan Kota Bandung. Tetapi dengan masih adanya keluhan dari para pemakai, menunjukan masih banyaknya permasalahan yang harus diatasi dan adanya kelemahan dari sistem pelayanan kepegawaian yang harus dicari solusinya. Ditambah dengan kebutuhan akan akses informasi yang lebih mudah terhadap SIMPEG, dari semua pegawai. Kondisi ini memungkinkan dilakukannya pengembangan terhadap sistem yang sudah ada, agar menjadi lebih baik lagi, untuk memenuhi kebutuhan lebih banyak pegawai yang terlibat di dalamnya.

II. 3. Analisis Sistem

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, sebenarnya sudah memberikan gambaran permasalahan yang terjadi dan dapat dibayangkan apa yang harusnya dilakukan untuk mengatasinya. Permasalahan yang timbul bisa dipastikan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai yang terlibat dalam proses pengolahan data kepegawaian. Kinerja pegawai yang belum menunjukan sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Baik pegawai yang bertugas menangani Entry Data, yang menerima berkas data dari pegawai lain, maupun pegawai yang datanya akan diolah SIMPEG.
2. SIMPEG tidak memberikan banyak masalah, hanya saja belum bisa memenuhi semua kebutuhan dari pegawai yang terlibat. Misalnya, jika seorang pegawai di

Unit Kerja lain (di luar Kepegawaian) ingin mengetahui data dirinya, tidak bisa langsung dilakukan, tetapi harus menghubungi Bagian Kepegawaian, karena memang SIMPEG ini tidak on line dengan unit lain di luar Kepegawaian. Untuk itu diharapkan adanya pengembangan sistem ke arah ini, sehingga bisa dilakukan pelayanan yang lebih baik lagi, dan tidak akan menyebabkan terjadinya keterlambatan proses pengajuan (terutama) KP, karena formulir pengajuan KP bisa langsung didapat dari komputer di unit kerjanya masing-masing.

Yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah :

1. Melakukan proses Entry Data segera, begitu berkas perubahan data pegawai diterima oleh petugas di Kepegawaian.
2. Mengingatkan pegawai agar segera melengkapi data dirinya, yang memang belum tersimpan di Bagian Kepegawaian, misalnya fotocopy ijasah dari pendidikan yang baru diselesaikan, fotocopy sertifikat seminar, diklat dsb., sedangkan untuk persyaratan administrasi lainnya yang sudah pernah masuk sebelumnya, sebaiknya Bagian Kepegawaian bisa melengkapinya, misalnya fotocoy SK terakhir, fotocopy ijasah terakhir dll.
3. Saat terjadi perubahan data di komputer, dibuat juga print out perubahan data pegawai untuk disimpan di bagian kearsipan, sehingga tidak akan terjadi perbedaan data di komputer dengan berkas perorangan pegawai.
4. Bisa dilakukan pengembangan sistem, agar bisa online dengan semua unit kerja yang berada di bawah Pemerintah Kota Bandung, sehingga setiap pegawai yang membutuhkan data dan informasi, bisa cepat mendapatkannya di unit kerjanya masing-masing.

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. SIMPEG sudah merupakan sarana pendukung bagi organisasi dalam memberikan pelayanan administratif kepada semua pegawai yang menjadi pemakai dari SIMPEG.
2. Keberadaan SIMPEG saat ini di Pemerintahan Kota Bandung cukup membantu dalam menyediakan informasi. Informasi yang dihasilkan tidak saja bermanfaat bagi kegiatan operasional seperti penyediaan laporan dan daftar gaji pegawai, tetapi juga untuk kegiatan manajerial seperti DUK dan daftar penilaian pegawai yang berguna untuk pimpinan dalam membuat suatu keputusan.
3. Software dan hardware yang merupakan sarana dan prasarana pendukung terhadap implementasi SIMPEG cukup memadai, hanya saja sumber daya manusia yang menjadi pengelolanya, harus lebih ditingkatkan lagi kemampuannya dan didorong untuk bisa mengembangkan keahliannya.
4. Berbagai keluhan pegawai berkenaan dengan Bagian Kepegawaian yang tidak profesional dalam memproses berkas mereka, lebih disebabkan oleh :
 - Kinerja pegawai yang belum menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Baik yang bertugas menangani Entry Data pada SIMPEG, yang menerima berkas data dari pegawai lain, maupun pegawai yang datanya akan diolah SIMPEG (yang sekaligus menjadi pemakai SIMPEG).
 - Prosedur yang tidak sederhana dan banyaknya persyaratan administrasi yang harus dilengkapi saat berurusan dengan Kepegawaian, menjadi salah satu penghambat lancarnya semua proses yang terjadi di Bagian Kepegawaian

5. Sudah saatnya dilakukan pengembangan terhadap SIMPEG yang sedang berjalan saat ini, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepada semua pegawai yang berada di semua perangkat daerah Pemerintah Kota Bandung. Lebih jauh lagi sebagai upaya untuk mendukung dan turut mengembangkan keberadaan SIMDA saat ini.

II. Saran

Diberikan saran untuk melakukan pengembangan terhadap Sistem Informasi Kepegawaian yang saat ini diterapkan. Pengembangan ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang sebaiknya dilakukan saat proses ini berlangsung, seperti sudah disampaikan pada bab sebelumnya. Adapun saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengembangan sistem agar bisa terhubung dengan semua perangkat daerah yang ada. Hal ini akan memudahkan bagi pemakai yang membutuhkan data dan informasi, sehingga bisa melakukan pengambilan informasi secara langsung tanpa melalui pihak ketiga (petugas komputer).
2. Memasukan semua formulir yang dibutuhkan dalam proses perubahan data pegawai ke dalam SIMPEG, sehingga akan memudahkan pegawai dalam pengisian formulir dan menyediakan data pendukungnya.

Formulir dimaksud adalah daftar isian yang harus dilengkapi oleh seorang pegawai, misalnya saja untuk kebutuhan :

- Kenaikan pangkat
 - Kenaikan gaji berkala
 - Penambahan atau pengurangan anggota keluarga
3. Secepatnya sarana pendukung yang sudah ada, segera dimanfaatkan. Berupa jaringan yang saat ini sudah dipasang dan software yang memungkinkan SIMPEG bisa on line dengan unit lainnya, hanya yang menjadi masalah adalah sumber daya manusia yang belum mempunyai keinginan untuk mewujudkannya.
 4. Pada SIMPEG yang baru, lebih baik jika dilakukan penggabungan tekstual, gambar dan grafik. Sehingga saat data seorang pegawai ditampilkan, akan

- terlihat juga rekaman gambar pegawai bersangkutan, beserta karakteristik keberhasilan kerjanya.
5. Mengikutsertakan pegawai yang menjadi pengelola SIMPEG dalam berbagai kursus atau pelatihan yang akan meningkatkan kompetensinya di bidang teknologi informasi.
 6. Rekrutmen SDM yang memang kompeten di bidang tersebut atau dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain (konsultan), akan sangat mendukung di dalam upaya implementasi dan pemeliharaan SIMPEG.

DAFTAR PUSTAKA

Jogiyanto H., 1999, "Analisis dan Disain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Alplikasi Bisnis", Andi, Yogyakarta.

Raymond Mc Leod Jr., 2001, "Sistem Informasi Manajemen jilid I", Prenhallindo Jakarta.

Raymond Mc Leod Jr., 1996, "Sistem Informasi Manajemen jilid II", Prenhallindo Jakarta.

Ronny K., 1996, "Dasar-dasar Sistem Informasi Manajemen", Dinastondo Jakarta.

Musanef, 1996, "Manajemen Kepegawaian di Indonesia jilid I", Gunung Agung Jakarta.

Sri Puji H., 2000, "Sistem Informasi Pengembangan Pegawai pada Kantor Camat Pringapus Kabupaten Semarang", Laporan Penugasan STIA LAN Bandung.

Makhdum P. dan Anwar Sanusi, 2001, "Teknologi Informasi dalam Pemerintahan", Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III LAN RI.

Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2001 Himpunan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Kelembagaan Perangkat Kota Bandung.

